



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

**KECAMATAN KOTA BANGUN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kata Pengantar

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan Rencana strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025 – 2030.

Rencana strategis Kecamatan Kota Bangun merupakan bagian integral dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan gambaran umum dan arah yang jelas terhadap kebijakan pembangunan di wilayah Kecamatan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan selama 5 (Tiga) tahun kedepan.

Didalam penyusunan Rencana strategis ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun.

Rencana strategis Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Pegawai Kecamatan Kota Bangun didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kota Bangun, Desember 2025

Camat Kota Bangun



Abdul Karim, S.Pd

NIP. 196911201996031002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN KOTA BANGUN

Jalan : Ki Hajar Dewantara Kota Bangun Telp.(0541) 6668674 Kode Pos 75561

Email : kotabangunkec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KOTA BANGUN

Nomor : P-736/CamatKoba/000.7.2.2/06/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KOTA BANGUN TAHUN 2025–2029

CAMAT KOTA BANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029, diperlukan tim penyusun yang bertugas mempersiapkan dan menyusun dokumen dimaksud secara sistematis dan partisipatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kota Bangun tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoseia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

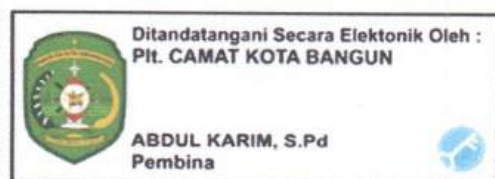
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-2838/BAPP/065.11/06/2025 Tanggal 25 Juni 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029, dengan susunan personalia sebagai terlampir;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) bertugas:
- a. Menyusun rancangan awal Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan;
 - c. Melakukan konsultasi publik/koordinasi dengan pihak terkait;
 - d. Menyusun dokumen akhir Renstra yang lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan hasil penyusunan kepada Camat Kota Bangun.
- KETIGA** : Tim Personalia yang diangkat dalam jabatan tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Kota Bangun selaku Atasan/Pimpinan Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Kota Bangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bangun
pada tanggal 30 Juni 2025

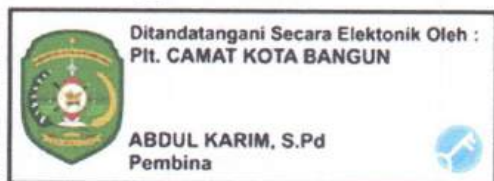


LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOTA BANGUN
NOMOR : P-736/CamatKoba/000.7.2.2/06/202
TANGGAL : 30 Juni 2025
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029

Personalia Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ABDUL KARIM, S.Pd	Plt. CAMAT	PENGARAH / PENANGGUNGJAWAB
2	SUPRIADI, S.I.P	KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KETUA
3	MURLIAN, S.A.P	KASUBBAG. PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
4	SURIANSYAH, SE	KASI. PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5	Drs. SYAHMINAN	KASI. PELAYANANUMUM	ANGGOTA
6	NURUL ASINAR, S.I.P	Plt. KASUBBAG. UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
7	AGUS SOPIAN, S.I.P	KASI. KESSOS	ANGGOTA
8	SYAHRIAL, S.I.P	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA

Ditetapkan di Kota Bangun
pada tanggal 30 Juni 2025



Daftar Isi

Cover	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tupoksi Camat	7
2.1.2 Susunan Organisasi Kecamatan Kota Bangun	7
2.1.3 Tata Kerja organisasi kecamatan Kota Bangun	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan	18
2.2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Jabatan	19
2.3. Aset Kecamatan Kota Bangun	19
1. Aset Gedung dan Bangunan	35
2. Aset Jalan Dan Jembatan	39
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	44
2.5. Kelompok sasaran layanan	59
2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	59
2.7. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	61
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	68
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025-2029	69
3.3. Strategi Perangkat Daerah	70
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	72

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	75
4.1 Program.....	75
4.2. Kegiatan.....	77
BAB V PENUTUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Kota Bangun, sebagai salah satu perangkat daerah, memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat kecamatan, Kecamatan Kota Bangun mengelola berbagai urusan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

Pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kecamatan Kota Bangun akan memasuki periode baru yaitu tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah. Pasal 272 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan. Setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025, menandai dimulainya.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan yang meliputi urusan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pelayanan Publik, Urusan Sosial, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Lokal. Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, Kecamatan Kota Bangun dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakatnya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan yang tujuan, sasaran, strategi, Arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah untuk periode lima tahun. Tahapan penyusunan Renstra PD meliputi: Persiapan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan. dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta potensi dan permasalahan yang ada di wilayah kerja perangkat daerah dimana dokumen ini merupakan panduan operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam pengukuran kinerja perangkat daerah, baik dalam hal capaian program maupun realisasi anggaran

Dalam prosesnya dibutuhkan data dan informasi yang terkait dengan kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta potensi dan tantangan

yang dihadapi yang di analisis sehingga menjadi rumusan tujuan, dan strategi perangkat daerah yang diselaraskan dengan induk perencanaan pembangunan daerah atau RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang tentunya melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan menyelaraskan prioritas yang kemudian di sahkan menjadi dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, Renstra menjadi penghubung antara perencanaan strategis jangka menengah dengan implementasi program tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025-2029 didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136)
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 1447);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan

kewilayahan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik *good governance* dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Kecamatan Kota Bangun
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Kota Bangun
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kota Bangun untuk periode 5 (lima) tahun kedepan
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran
5. Menyediakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja target, dan pagu indikatif
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
7. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Kota Bangun

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan berdasarkan Buku Panduan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Penyusunan Ranwal Renstra PD No. B-2838/BAPP/065.11/06/2025), sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun tahun 2025-2029.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi gambaran pelayanan Kecamatan Kota Bangun memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Kota Bangun.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Memaparkan Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah serta membahas strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasarnya , rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kota Bangun dalam lima tahun mendatang berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan.

Memuat rencana program dan kegiatan, subkegiatan beserta kinerja , indicator, target dan pagu indikatif, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Perangkat.

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Th. 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Perangkat Daerah Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2.1.1 Tupoksi Camat

Tugas pokok dan Fungsi Camat dalam melaksanakan tugas meliputi :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan,
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan,

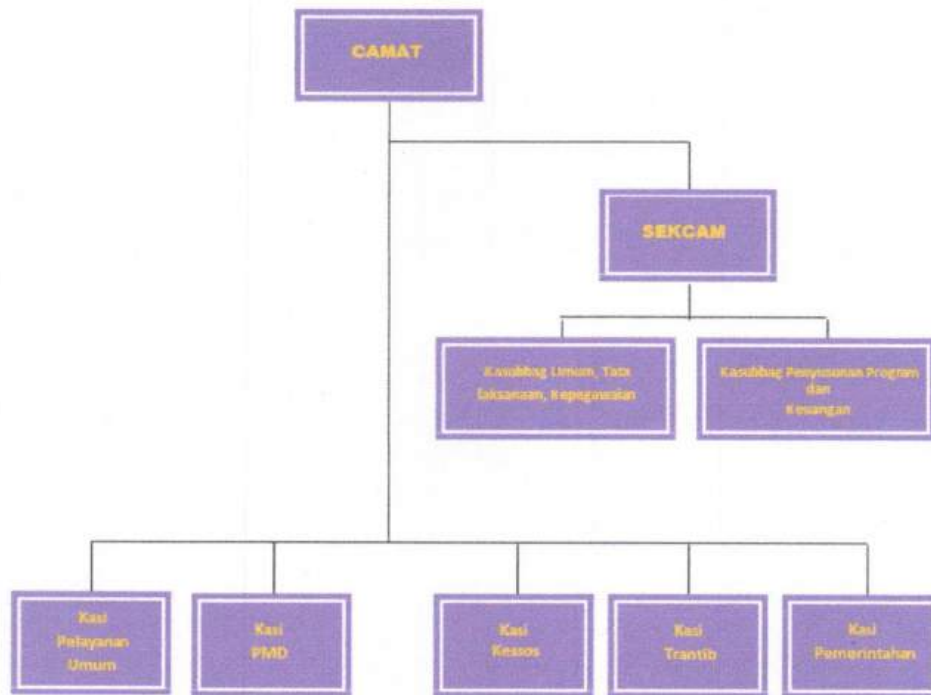
2.1.2 Susunan Organisasi Kecamatan Kota Bangun

Susunan organisasi Kecamatan Kota Bangun terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
 - Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Umum

Gambar. 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



2.1.3 Tata Kerja organisasi kecamatan Kota Bangun

Tata Kerja Sekretaris meliputi :

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan,
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P,
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD,
- h. Mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan,
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa,
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat

Tata Kerja Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

- c. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/ jasa meliputi menyusun Trencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD
- e. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi,
- f. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja, merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, "Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan

Kepegawaian,

- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, dan
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris
- d. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD,
- e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
- f. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran , verifikasi pengelolaan keuangan
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan,
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan, merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan, dan
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Pemerintahan meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan

- kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan,
- d. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan,
 - e. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati,
 - f. Merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati,
 - g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan,
 - h. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga,
 - i. Merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan,
 - j. Merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa,
 - k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan,
 - l. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan,
 - m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan, dan
 - n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai

hasil kerja bawahan,

- b. Menyusun rencana kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. Merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat desa/kelurahan,
- d. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang politik dalam negeri / izin gangguan (ho) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati,
- e. Merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- f. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA,
- g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama,
- h. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi,
- i. Merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup,
- j. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan standar operasional prosedur (sop) urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
- k. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan

ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan

- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,

Tata kerja kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. Merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, izin mendirikan bangunan dan pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati,
- d. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita,
- e. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata,
- f. Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan lokasi daur ulang sampah (LDUS) dan air bersih perdesaan, merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang,
- g. Merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air,
- h. Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan,
- i. Merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum, merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan standar operasional prosedur (SOP) urusan pemberdayaan masyarakat desa,
- j. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pemberdayaan masyarakat desa,
- k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan

pemberdayaan masyarakat desa, dan

- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas
- m. Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tata kerja kepala seksi kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan kesejahteraan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan progam dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi,
- d. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan Ak/1 (pencari kerja swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati,
- e. Merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (lsm), keluarga berencana (kb), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- f. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan,
- g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial,
- h. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan,
- i. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan,
- j. Merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan

kehidupan beragama,

- k. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan standar operasional prosedur (SOP) urusan kesejahteraan sosial:
- l. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan kesejahteraan sosial, m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial, dan

Tata kerja kepala seksi pelayanan umum meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan, menyusun rencana kegiatan urusan pelayanan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan,
- c. Merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman,
- d. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati,
- e. Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman,
- f. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa,
- g. Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan,
- h. Merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum,
- i. Merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan,

- j. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan standar operasional prosedur (sop) urusan pelayanan umum,
- k. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pelayanan umum,
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pelayanan umum, dan
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda organisasi Pemerintahan, Oleh karena itu idealnya jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi, secara keseluruhan jumlah Pegawai Kantor Camat Kota Bangun sebanyak 25 Orang untuk ASN dan untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berjumlah 28 orang dengan komposisi menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Kota Bangun. Dalam beberapa tahun kemudian akan di angkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Ini adalah program di mana pegawai pemerintah dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati antara pemerintah dan calon pegawai. Program ini biasanya digunakan untuk mengisi kekosongan di berbagai instansi pemerintah dengan pegawai yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Dengan adanya program ini besar harapannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public di Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun

2.2.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1	2	3	4	5
1. PNS				
	Pembina Tk I	IV/b	0	
	Pembina	IV/a	1	
	Penata Tk I	III/d	3	
	Penata	III/c	1	
	Penata Muda Tk I	III/b	5	
	Penata Muda	III/a	6	
	Pengatur Tk I	II/d	9	
	Pengatur	II/c		
	Pengatur Muda TK I	II/b		
	Pengatur Muda	II/a		
	Juru Tk I	I/d		
	Juru	I/c		
	Juru Muda Tk I	I/b		
Jumlah			25	
2 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)				
PPPK			28	
Total Pegawai			53	

Sumber: Bagian Umum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Kecamatan Kota Bangun, Agustus 2025



Tabel 2.2.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis jabatan

2.2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Jabatan

Grafik 2.2.1 ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	2	3	4
1. PNS			
	JABATAN ADMINISTRATOR	12	0
	JABATAN ADMINISTRATOR	11	1
	JABATAN PENGAWAS	9	4
	JABATAN PENGAWAS	8	1
	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	7	5
	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	3
	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	7
	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	1
	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	3
	Jumlah		25
2 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)			
	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	7
	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	6
	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	15
	Total Pegawai		28

Sumber: Bagian Umum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Kecamatan Kota Bangun, Agustus 2025

2.3. Aset Kecamatan Kota Bangun

2.3.1. Aset Tanah

Beberapa Aset yang di miliki Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun sebagai penunjang kinerja, di Sajikan dalam Tabel di Bawah ini terdiri dari Aset tanah, Aset Mesin, aset Gedung, Aset jalan dan Aset tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tanah kecamatan Kota Bangun dapat kami sajikan dalam table di bawah ini :

Tabel 2.3.1 Tabel daftar aset tanah Kecamatan Kota Bangun

No	Nama Barang	Luas	Tahun pengadaan	Alamat	Harga
1	2	5	6	7	13
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1,155.00	2005	Jl. K.H. Dewantara	86,625.00
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	255.00	2005	Jl. Mulawarman II KBU	19,125.00

No	Nama Barang	Luas	Tahun pengada an	Alamat	Harga
1	2	5	6	7	13
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	3,399.00	2005	Jl. Mulawarman II KBU	254,925.00
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	225.00	2005	JALAN KIHAJAR DEWNATARA	16,875.00
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	978.00	2005	Jalan Ki Hajar Dewantara	97,800.00
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1,115.00	2005	KOTA BANGUN ULU	55,750.00
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	500.00	2005	DESA KOTA BANGUN ULU	37,500.00
8	Tanah Bangunan Poliklinik	4,700.00	2005	DESA PELA	188,000.00
9	Tanah Lapangan Sepak Bola	14,158.00	2005	KOTA BANGUN ILIR	424,740.00
10	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	2,500.00	2005	Jl. M. SIDDIK. DESA KOTA BANGUN ULU	187,500.00
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5,052.00	2006	Desa Sebelimbingan Kecamatan Kota Bangun	74,264.00
12	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	748.00	2006	DESA KOTA BANGUN ULU	56,100.00
13	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	0.00	2006	KECAMATAN KOTA BANGUN	10,486.00
14	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	2,600.00	2006	KOTA BANGUN ULU	100,100.00
15	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	7,550.00	2006	KOTA BANGUN ILIR	151,000.00
16	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	2,970.00	2006	LIANG ULU	74,250.00
17	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1,096.00	2006	KEDANG MURUNG	18,084.00
18	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	5,315.00	2006	KEDANG MURUNG	87,697.50
19	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	2,107.00	2006	KEDANG MURUNG	34,765.50
20	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1,412.00	2006	KEDANG MURUNG	23,298.00
21	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	9,772.00	2006	KOTA BANGUN SEBERANG	136,808.00
22	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	208.00	2010	Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun	38,981.25
23	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	444.00	2010	Desa Liang Ulu Kec. Kota Bangun	14,430.00
24	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	20,671.00	2010	Desa Kota Bangun Seberang Kec. Kota Bangun	206,710.00
25	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6,747.00	2010	Desa Liang Ilir Kec. Kota Bangun	77,590.50
26	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	16,341.00	2010	Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun	228,774.00
27	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	258.00	2010	Desa Muhuran Kec. Kota Bangun	2,819.00
28	Tanah Untuk Jalan Desa	2,608.00	2010	Desa Loleng Kec. Kota Bangun	22,168.00
29	Tanah Lapangan Lainnya	18,939.00	2012	Jl. Stadion Rt.02 Kota Bangun Ulu	523,363.60
30	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	5,832.00	2013	JL. SRI BANGUN KEC. KOTA BANGUN	64,152.00
31	Tanah Kaveling (dst)	930.00	2013	JL. SRI BANGUN. KEC. KOTA BANGUN	1,834.00
32	Tanah Bangunan Pasar	1,430.00	2013	JL. JEND. A. YANI. KEC. KOTA BANGUN	5,005.00

No	Nama Barang	Luas	Tahun pengada an	Alamat	Harga
1	2	5	6	7	13
33	Tanah Bangunan Pasar	8,000.00	2013	DESA KEDANG MURUNG. KEC. KOTA BANGUN	88,000.00
34	Tanah Bangunan Pasar	613.00	2013	Desa Pela	21,600.00
35	Tanah Bangunan Terminal Darat	4,763.00	2013	JL. SRI BANGUN. KEC. KOTA BANGUN	123,825.00
36	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	5,000.00	2013	JL. SRI BANGUN. KEC. KOTA BANGUN	390,000.00
37	Tanah Lapangan Terbang lainnya	58,450.00	2013	JL. SRI BANGUN. KEC. KOTA BANGUN	204,575.00
38	Tanah Kebun Induk	50,487.00	2017	Jalan Merai RT.001 Dusun Mantang Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun	90,045.00
					4,239,565.35

Sumber: Bagian Umum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Kecamatan Kota Bangun, Agustus 2025

2.3.2. Aset Peralatan Dan Mesin

Aset Peralatan dan mesin adalah Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Aset Peralatan dan mesin kecamatan Kota Bangun dapat kami sajikan dalam table di bawah ini

Tabel 2.3.2 Tabel daftar Aset Peralatan Dan Mesin Kecamatan Kota Bangun

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
1	P.C Unit	1	-	2005	95,646.66
2	Meja 1/2 Biro	12	-	2006	17,178.70
3	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	-	2006	7,250.00
4	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	-	2006	6,354.40
5	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	5	-	2006	230,440.00
6	P.C Unit	17	-	2006	18,236.78
7	P.C Unit	5	-	2006	18,236.78
8	P.C Unit	1	-	2006	9,118.43
9	P.C Unit	9	-	2006	18,236.78
10	P.C Unit	1	-	2006	9,118.35
11	P.C Unit	1	-	2006	9,118.39
12	P.C Unit	1	-	2006	9,118.39
13	P.C Unit	1	-	2006	9,118.39
14	P.C Unit	1	-	2006	9,118.39
15	P.C Unit	5	-	2006	18,236.78
16	P.C Unit	1	-	2006	9,118.39
17	P.C Unit	9	-	2006	18,236.78

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
18	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	YAMAHA / YAMAHA JUPITER / 2S6 JUPITER MX	2007	18,000.00
19	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	YAMAHA / YAMAHA 1S7 JUPITER MX	2007	18,000.00
20	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	YAMAHA / YAMAHA / 2S6 JUPITER MX	2007	18,000.00
21	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	YAMAHA / 5 BP SCORPIO	2007	23,000.00
22	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	YAMAHA / YAMAHA / 2S6 JUPITER MX	2007	18,000.00
23	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	YAMAHA / YAMAHA / 2S6 JUPITER MX	2007	18,000.00
24	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	YAMAHA / YAMAHA / 2S6 JUPITER MX	2007	18,000.00
25	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	YAMAHA / YAMAHA / RX-K 135	2007	21,790.00
26	Truck + Attachment	1	TOYOTA DYNA / 130 HT	2007	217,100.00
27	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	1	-	2007	9,095.00
28	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	1	-	2007	13,500.00
29	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	OLIVETTY	2007	1,500.00
30	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2	OLIVETTY	2007	9,000.00
31	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	GRAFITI	2007	2,271.00
32	Lemari Kayu	1	-	2007	3,000.00
33	Lemari Kayu	1	-	2007	3,150.00
34	Rak Kayu	1	-	2007	1,750.00
35	Filing Cabinet Besi	1	LION / L 44	2007	1,223.00
36	Meja Rapat	1	-	2007	2,400.00
37	Meja Rapat	1	-	2007	2,400.00
38	Tempat Tidur Besi	1	-	2007	4,000.00
39	Meja 1/2 Biro	1	-	2007	3,000.00
40	Sofa	1	-	2007	3,000.00
41	Sofa	1	-	2007	3,000.00
42	Sofa	1	-	2007	3,000.00
43	Meubeleur lainnya	1	-	2007	2,500.00

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
44	Meubeleur lainnya	1	-	2007	2,368.00
45	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	-	2007	9,000.00
46	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	-	2007	9,000.00
47	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	-	2007	9,000.00
48	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	-	2007	6,359.00
49	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	-	2007	9,085.00
50	Tustel	1	NIKON	2007	5,000.00
51	Tustel	1	NIKON	2007	5,100.00
52	Slide Projector	1	TOSHIBA	2007	20,000.00
53	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	-	2007	4,050.00
54	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	YAMAHA	2007	2,000.00
55	P.C Unit	1	-	2007	6,500.00
56	P.C Unit	1	-	2007	5,000.00
57	P.C Unit	1	-	2007	13,500.00
58	P.C Unit	1	-	2007	13,627.00
59	P.C Unit	1	-	2007	16,326.00
60	Note Book	1	PORTEGE	2007	18,000.00
61	Note Book	1	TOSHIBA / PORTEGE	2007	18,000.00
62	Note Book	1	-	2007	16,539.00
63	Pick Up	1	FOARD RANGER SC 4X2 BASE 2,5 SL MT	2009	174,500.00
64	Sepeda Motor	1	Mega Pro CW	2009	20,480.00
65	Sepeda Motor	1	Vario CW (Hj. NURUL)	2009	15,500.00
66	Tempat Tidur Kayu	1	Spring Bed	2009	25,646.00
67	Kipas Angin	1	Maspion	2009	1,050.00
68	P.C Unit	3	Acer	2009	19,900.00
69	P.C Unit	1	Acer	2009	9,950.00
70	Note Book	3	Thosiba	2009	48,525.00
71	Monitor	1	Samsung	2009	2,850.00
72	Monitor	2	Samsung	2009	5,700.00
73	Monitor	2	Samsung / 17"	2009	3,650.00
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Canon / MP 198	2009	1,700.00
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson LQ 2180	2009	8,750.00
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Canon / MP 198	2009	5,100.00
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson / LQ 2180	2009	8,750.00
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Canon / MP 198	2009	1,700.00
79	Sepeda Motor	1	Jupiter MX CW	2010	17,150.00
80	Sepeda Motor	1	Jupiter MX CW (Julkifli,SE)	2010	17,150.00

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
81	Sepeda Motor	1	Jupiter MX CW (Sugiarto,SE)	2010	17,150.00
82	Sepeda Motor	1	Jupiter MX CW (Akhmad Ripai)	2010	17,150.00
83	Sepeda Motor	1	Jupiter MX CW	2010	17,150.00
84	Camera Electronic	1	Nikon + Memory / D 3000	2010	11,605.00
85	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	GARMIN / GPS / GARMIN CSX 76	2011	7,000.00
86	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	SUNTO / KOMPAS / SUNTO TANDEM CLINOMETER	2011	4,200.00
87	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	OLYPIA / F18	2011	2,820.00
88	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	OLYMPIA / F18	2011	2,820.00
89	A.C. Window	4	LG	2011	20,125.00
90	A.C. Window	10	LG	2011	30,185.00
91	A.C. Window	1	LG	2011	5,040.00
92	Handy Cam	1	Sony	2011	12,100.00
93	Camera Electronic	1	Canon / EOS. 550D	2011	11,600.00
94	Camera Electronic	1	CANON / CANON S 95	2011	4,400.00
95	Camera Electronic	1	CANON / CANON G 12	2011	5,600.00
96	P.C Unit	1	Acer	2011	7,500.00
97	P.C Unit	1	Acer	2011	7,500.00
98	P.C Unit	2	ACER	2011	15,000.00
99	Note Book	3	Toshiba	2011	45,000.00
100	Note Book	3	TOSHIBA / L 745	2011	45,000.00
101	Hard Disk	1	WD My Passport Essential	2011	1,040.00
102	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	ICA / UPS ICA CT 1682	2011	5,850.00
103	Lemari Besi/Metal	2	VIP	2012	4,994.00
104	Filing Cabinet Besi	1	VIP	2012	5,192.00
105	Lemari Kaca	2	-	2012	9,999.00
106	Alat Kantor Lainnya	1	YANMAR STAMPORD / HT.35.Y	2012	189,449.70
107	Bangku Tunggu	1	-	2012	5,997.20
108	Meja Komputer	1	VIP	2012	1,599.40
109	A.C. Split	1	LG / LG S 09 LG-2	2012	9,941.80

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
110	A.C. Split	1	LG / LG S 09 LG-2	2012	4,970.90
111	A.C. Split	1	LG / S 09 LG - 2	2012	9,941.80
112	Stabilisator	1	UPS ICA / CT 1680 B 3200	2012	5,995.00
113	Stabilisator	1	UPS ICA / CT 1680 B 3200	2012	5,995.00
114	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	ACTIVE	2012	1,991.00
115	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	ACTIVE	2012	1,991.00
116	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	ACTIVE	2012	1,991.00
117	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	ACTIVE	2012	1,991.00
118	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	USHINTO	2012	1,991.00
119	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	ELENMAX VENUS	2012	9,999.00
120	Peralatan Cetak lainnya	1	CANON / iR 1024	2012	14,991.90
121	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	CANON / PIXMA iX 6560	2012	4,599.10
122	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / EPSON INJEK L 800	2012	4,499.00
123	electric generating set lainnya (dst)	1	ATS	2013	50,398.00
124	Station Wagon	1	Nissan / Navara MT Double Cabin	2013	378,037.70
125	Speed Boat / Motor Tempel	1	-	2013	102,500.00
126	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	BROTHER	2013	5,830.00
127	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1	-	2013	4,301.00
128	Lemari Kayu	1	-	2013	1,481.20
129	Filing Cabinet Besi	1	VIP	2013	8,360.00
130	Lemari Kaca	1	-	2013	13,640.00
131	Mesin Absensi	1	FINGER FRINT SOLUTION X100-C	2013	112,408.00
132	Meja 1/2 Biro	1	-	2013	29,302.00
133	Kursi Tamu	1	-	2013	2,474.80
134	Kursi Putar	1	-	2013	2,060.80
135	Kursi Lipat	1	-	2013	4,121.60
136	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	-	2013	13,204.40
137	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	2013	12,155.00
138	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	2013	7,480.00
139	Lensa Kamera	1	-	2013	2,500.00
140	Handy Talky (HT)	1	-	2013	1,840.00
141	P.C Unit	1	-	2013	17,134.08
142	Lap Top	1	-	2013	14,233.32
143	Monitor	1	-	2013	4,036.96

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
144	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	-	2013	1,363.44
145	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / LQ 2190	2013	17,270.00
146	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	ICA / 1000/5000 VA	2013	10,725.00
147	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	-	2013	2,957.34
148	Peralatan Jaringan lainnya	1	TP LINK	2013	5,775.00
149	A.C. Split	1	LG / D09RX	2014	15,859.00
150	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	FANTONI	2014	8,542.00
151	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	ICA / CS 1238v a 600w	2014	1,760.00
152	P.C Unit	2	Asus	2015	23,980.00
153	Monitor	2	LG / 20M37 A-B	2015	3,000.00
154	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON LQ 2190 / LQ 2190	2015	8,600.00
155	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	CANON / IP. 110	2015	4,400.00
156	Kursi Besi/Metal	10	Fantoni / F-520 A2 Coklat	2018	10,560.00
157	Dump Truck	1	ISUZU / NMR 71T HD 6.1	2019	446,086.00
158	Pick Up	1	suzuki / New CARRY FD	2019	140,000.00
159	Pick Up	1	SUZUKI/NEW CARRY FD / AEV415P CL (4X2) M/T	2019	140,000.00
160	Pick Up	1	SUZUKI / NEW CARRY FD / AEV415P CL (4X2) M/T	2019	140,000.00
161	Pick Up	1	SUZUKI/NEW CARRY FD / AEV415P CL (4X2) M/T	2019	140,000.00
162	Layar Film/Projector	1	ACER / BS-020	2019	5,280.00
163	P.C Unit	2	NIMITZ N5 AURORA	2019	56,552.00
164	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	EPSON / L3110	2019	24,860.00

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
165	Dump Truck	1	Mitsubishi / FE74 HD K/ Dump Truck	2020	471,678.06
166	Dump Truck	1	Mitsubishi / FE74 HD K/ Dump Truck	2020	471,678.06
167	Lemari Besi/Metal	1	4DRW	2020	23,430.00
168	Rak Besi	1	Tactix / 5 Shelf Storage Rack Ukuran 80 x 30.5 x 183 cm	2020	1,496.00
169	Rak Besi	1	Tactix / 5 Shelf Storage Rack Ukuran 80 x 30.5 x 183 cm	2020	1,496.00
170	Rak Besi	1	Tactix / 5 Shelf Storage Rack Ukuran 80 x 30.5 x 183 cm	2020	1,496.00
171	Rak Besi	1	Tactix / 5 Shelf Storage Rack Ukuran 80 x 30.5 x 183 cm	2020	1,496.00
172	Rak Besi	1	Tactix / 5 Shelf Storage Rack Ukuran 80 x 30.5 x 183 cm	2020	1,496.00
173	Rak Besi	1	Tactix / 5 Shelf Storage Rack Ukuran 80 x 30.5 x 183 cm	2020	1,496.00
174	Rak Besi	1	Tactix / 5 Shelf Storage Rack Ukuran 80 x 30.5 x 183 cm	2020	1,496.00
175	Rak Besi	1	Tactix / 5 Shelf Storage Rack Ukuran 80 x 30.5 x 183 cm	2020	1,496.00
176	Filing Cabinet Besi	1	BROTHER / VIP B-103	2020	2,893.00
177	Filing Cabinet Besi	1	BROTHER / VIP B-103	2020	2,893.00
178	Filing Cabinet Besi	1	BROTHER / VIP B-103	2020	2,893.00
179	Filing Cabinet Besi	1	BROTHER / VIP B-103	2020	2,893.00

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
180	Filing Cabinet Besi	1	BROTHER / VIP B-103	2020	2,893.00
181	Filing Cabinet Besi	1	BROTHER / VIP B-103	2020	2,893.00
182	Filing Cabinet Besi	1	BROTHER / VIP B-103	2020	2,893.00
183	Filing Cabinet Besi	1	BROTHER / VIP B-103	2020	2,893.00
184	Filing Cabinet Besi	1	BROTHER / VIP B-103	2020	2,893.00
185	Filing Cabinet Besi	1	BROTHER / VIP B-103	2020	2,893.00
186	Alat Penghancur Kertas	1	Isherd / Paper Shredder GS-8M	2020	1,870.00
187	Meja Rapat	8	Expo Mejalipat M-FS-1601 160x60x75	2020	10,400.00
188	Meja Komputer	1	Aztec / SD-800P	2020	1,430.00
189	A.C. Window	1	POLYTRON FLOOR STANDING 3PK PSF-3003	2020	10,040.00
190	A.C. Window	1	POLYTRON FLOOR STANDING 3PK PSF-3003	2020	10,040.00
191	Loudspeaker	2	BARETONE 15 2 WAY PASSIVE / SPEAKER BOX	2020	5,300.00
192	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Vino / MT 120 1/2 Biro	2020	1,815.00
193	Audio Amplifier	1	Wisdom X4 Watt / Audio	2020	3,545.50
194	P.C Unit	1	Lenovo	2020	19,853.62
195	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson / L3110	2020	2,992.00
196	Meja 1/2 Biro	10	ORBIT TREND / OST-1060	2021	23,464.04
197	Sofa	1	JAGUAR	2021	19,380.00
198	A.C. Split	1	DAIKIN / FTC25NV14	2021	8,264.93
199	A.C. Split	1	DAIKIN / FTC25NV14	2021	8,264.93
200	A.C. Split	1	DAIKIN / FTC25NV14	2021	8,264.93

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
201	A.C. Split	1	DAIKIN / FTC25NV14	2021	8,264.93
202	A.C. Split	1	DAIKIN / FTC25NV14	2021	8,264.93
203	Televisi	1	SAMSUNG UHD / AU7000	2021	11,465.93
204	Televisi	1	SAMSUNG UHD / AU7000	2021	12,145.93
205	Genset	1	FD 130 KVA CUMMING / 6BT-G75E17	2021	199,080.00
206	GPS	1	GARMIN / 78 SC	2021	6,451.50
207	GPS	1	GARMIN / 78 SC	2021	6,451.50
208	P.C Unit	1	HP / D0733D CORE i7/16GB	2021	32,310.50
209	P.C Unit	1	HP AIO / MIT 3811	2021	10,574.93
210	P.C Unit	1	HP AIO / MIT 3811	2021	10,574.93
211	P.C Unit	1	LENOVO / CORE i7	2021	20,058.50
212	P.C Unit	1	HP AIO / MIT 3811	2021	10,574.93
213	P.C Unit	1	LENOVO / CORE i7	2021	20,738.50
214	P.C Unit	1	HP AIO / MIT 3811	2021	10,574.93
215	Lap Top	1	ASUS ROG STRIX-G G513IH-RR765B6T / STRIX-G G513IH-R765B6T-O	2021	22,440.00
216	Lap Top	1	ASUS ROG STRIX-G G513IH-RR765B6T / STRIX-G G513IH-R765B6T-O	2021	22,440.00
217	Lap Top	1	ASUS K413EQ / Core i7 EB7531 IPS	2021	22,500.50
218	Lap Top	1	ASUS K413EQ / Core i7 EB7531 IPS	2021	22,500.50

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
219	Lap Top	1	ASUS VIVO BOOK / A409F CORE I3 HDD 256 GB RAM DDR4 4GB	2021	10,354.93
220	Lap Top	1	ASUS VIVO BOOK / A409F CORE I3 HDD 256 GB RAM DDR4 4GB	2021	10,354.93
221	Lap Top	1	ASUS VIVO BOOK / A409F CORE I3 HDD 256 GB RAM DDR4 4GB	2021	10,354.93
222	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / ECO TANK L3110	2021	4,042.50
223	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / ECO TANK L3110	2021	4,042.50
224	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / L5190	2021	5,236.00
225	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / L5190	2021	5,236.00
226	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / L5190	2021	5,236.00
227	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / DS-410	2021	13,480.50
228	alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst)	1	DJI / MAVIC 2 PRO	2021	35,220.00
229	Lemari Besi/Metal	1	BROTHER / B212	2022	5,805.30
230	Lemari Besi/Metal	1	BROTHER / B212	2022	5,805.30
231	Kursi Besi/Metal	2	Acero / G445	2022	8,991.00
232	Kipas Angin	2	Sekai Misty Fan / Misty Fan	2022	15,384.60
233	Lap Top	1	HP / 240 GB CORE i7 WIN 10	2022	13,786.20
234	Lap Top	1	HP / 240 GB CORE i7 WIN 10	2022	13,786.20
235	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	BROTHER / ADS-2200	2022	11,821.50
236	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	BROTHER / ADS-2200	2022	11,821.50

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
237	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	Mitsubishi / Xpander Cross CVT	2023	360,000.00
238	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	Mitsubishi / Xpander Cross CVT	2023	360,000.00
239	Pick Up	1	SUZUKI / SUZUKI NEW CARRY PU FD AC PS	2023	174,500.00
240	Meja Kerja Kayu	5	INDACHI / DD 160 WL 2 laci	2023	32,500.00
241	Meja Rapat	5	UNO / UCT 7763N	2023	34,125.00
242	Meja Rapat	1	UNO / UCT 7763N	2023	6,825.00
243	Meja Bundar	1	no merk / Meja Bundar dengan kaca tempered	2023	2,896.00
244	Kursi Biasa	2	no merk / Wilshire klasik	2023	3,904.00
245	Workstation	1	BIC Modern Office / Meja Kerja 6 Staff	2023	24,400.00
246	Workstation	1	BIC Modern Office / Meja Kerja 6 Staff	2023	24,400.00
247	Workstation	2	no merk / 6 Meja	2023	50,000.00
248	Workstation	1	no merk / 6 Meja	2023	25,000.00
249	Workstation	1	no merk / 6 Meja	2023	25,000.00
250	Workstation	1	no merk / 6 Meja	2023	25,000.00
251	Workstation	1	no merk / 6 Meja	2023	25,000.00
252	Workstation	1	no merk / 6 Meja	2023	25,000.00
253	Sofa	1	no merk / Sofa type L	2023	8,750.00
254	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	9	KENT / KD104	2023	25,650.00
255	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	KENT / KD104	2023	22,800.00

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
256	Kursi Kerja Pejabat lainnya	7	Kursi KENT / Type KD104 Kursi kerja Dudukan dan sandaran busa c	2023	19,950.00
257	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	Kursi KENT / Type KD104 Kursi kerja Dudukan dan sandaran busa c	2023	2,850.00
258	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	Kursi KENT / Type KD104 Kursi kerja Dudukan dan sandaran busa c	2023	2,850.00
259	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	Kursi KENT / Type KD104 Kursi kerja Dudukan dan sandaran busa c	2023	11,400.00
260	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	Kursi KENT / Type KD104 Kursi kerja Dudukan dan sandaran busa c	2023	11,400.00
261	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	Kursi KENT / Type KD104 Kursi kerja Dudukan dan sandaran busa c	2023	8,550.00
262	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	Kursi KENT / Type KD104 Kursi kerja Dudukan dan sandaran busa c	2023	8,550.00
263	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	Kursi KENT / Type KD104 Kursi kerja Dudukan dan sandaran busa c	2023	5,700.00
264	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson / ECOTANK L3210	2023	3,550.00

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
265	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson / ECOTANK L3210	2023	3,550.00
266	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson / ECOTANK L3210	2023	3,550.00
267	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / DS 770-II	2023	13,450.00
268	P.C Unit	1	Asus / ROG G13CH-7F1053507WS	2024	34,060.00
269	P.C Unit	1	Asus / ROG G13CH-7F1053507WS	2024	34,060.00
270	P.C Unit	1	ASUS / PC AIO A3402WBAK-WPC715WS	2024	18,750.00
271	P.C Unit	1	ASUS / PC AIO A3402WBAK-WPC715WS	2024	18,750.00
272	P.C Unit	1	ASUS / PC AIO A3402WBAK-WPC715WS	2024	18,750.00
273	P.C Unit	1	ASUS / PC AIO A3402WBAK-WPC715WS	2024	18,750.00
274	P.C Unit	1	ASUS / PC AIO A3402WBAK-WPC715WS	2024	18,750.00
275	Lap Top	1	Asus / Vivobook A1404VA	2024	17,740.00
276	Lap Top	1	Asus / Vivobook A1404VA	2024	17,740.00
277	Lap Top	1	Asus / Vivobook A1404VA	2024	17,740.00
278	Lap Top	1	ACER / Travelmate P214	2024	18,900.00
279	Lap Top	1	ACER / Travelmate P214	2024	18,900.00
280	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson / Eco tank L14150	2024	10,950.00
281	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / PRINTER INK JET L5290	2024	5,950.00

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
282	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / PRINTER INK JET L5290	2024	5,950.00
283	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / PRINTER INK JET L5290	2024	5,950.00
284	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / PRINTER INK JET L5290	2024	5,950.00
285	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / WORKFORCE DS-530II	2024	11,650.00
286	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	EPSON / WORKFORCE DS-530II	2024	11,650.00
287	Meja Tambahan	1	OLYMPIC	2007	187.00
288	Meja 1/2 Biro	1	-	2007	750.00
289	Meja 1/2 Biro	1	-	2007	750.00
290	Kursi Putar	1	-	2007	553.00
291	Meubeleur lainnya	1	-	2007	450.00
292	Meubeleur lainnya	1	-	2007	450.00
293	Meja Komputer	2	VIP	2012	1,599.40
294	Jam Mekanis	1	STYLO	2012	297.00
295	Jam Mekanis	1	STYLO	2012	148.50
296	Jam Mekanis	1	STYLO	2012	297.00
297	Jam Mekanis	6	STYLO	2012	1,039.50
298	Kipas Angin	2	MIYAKO	2012	770.00
299	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	USHINTO	2012	5,973.00
300	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	-	2013	345.00
301	Peralatan Minikomputer lainnya	2	ICA / ICA CN.650	2015	1,600.00
	Kursi Lipat	84	Chitose / Yamato NN	2018	34,782.00
303	alat pengangkat lainnya (dst)	1	Krisbow / Handtruck 150 Kg	2020	440.00
304	Microphone Floor Stand	2	Pasif Tripod Speaker / Portable SPS- 502 M	2020	492.00
305	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	safety 3 Kg Powder	2020	575.30
306	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	safety 3 Kg Powder	2020	575.30
307	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	Fire Head Springkler / Type Pendent	2020	298.80
308	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Fantoni / 90 HD	2020	660.00
309	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Fantoni / 90 HD	2020	660.00

No	Jenis Barang	Jumlah	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga
1	2	3	4	5	6
310	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Fantoni / 90 HD	2020	660.00
311	Microphone/Wireless MIC	1	Ashley / Wireless Microphone System	2020	920.00
312	Fire Alarm System	1	H.C Bell / 6" HC - 1024	2020	203.50
313	Fire Alarm System	1	Honeywell	2020	377.30
314	Fire Alarm System	1	H.C Bell / 6" HC - 1024	2020	203.50
315	Fire Alarm System	1	Honeywell	2020	377.30
316	Meja Kerja	1	Vino 121	2022	899.10

7,625,245.26

Sumber: Bagian Umum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Kecamatan Kota Bangun, Agustus 2025

2.3.3. Aset Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan adalah Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Gedung dan Bangunan kecamatan Kota Bangun dapat kami sajikan dalam table di bawah ini

Tabel 2.3.3 daftar aset gedung dan bangunan

No	Nama Barang	Kondisi	Kontruksi Bangunan		Luas	Letak Lolkasi	Harga
			Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak			
1	2	5	6	7	8	9	10
1	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Baik	Tidak			Desa Loleng Kec. Kota Bangun	492,643.48
2	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Baik	Tidak			Jalan A. Yani	51,688.40
3	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	320	JALAN KI HAJAR DEWANTARA	274,100.00
4	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Baik	Tidak	Tidak	144	JALAN JEND. A. YANI	245,324.00
5	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Kurang Baik	Tidak	Tidak	302	JALAN KI HAJAR DEWANTARA	131,600.00
6	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Kurang Baik	Tidak	Tidak	427	JALAN JEND. A. YANI	179,300.00
7	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik				DESA KOTA BANGUN ULU KECAMATAN KOTA BANGUN	46,150.12
8	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	Baik				DESA PELA KECAMATAN KOTA BANGUN	55,680.00

Tabel 2.3.3 daftar aset gedung dan bangunan

No	Nama Barang	Kondisi	Kontruksi Bangunan		Luas	Letak Lokasi	Harga
			Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak			
1	2	5	6	7	8	9	10
9	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	Baik				LIANG, KOTA BANGUN SEBERANG, KBU, KBI	1,215,109.59
10	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik				DESA LIANG ILIR, MUHURAN, KDM KECAMATAN KOTA BANGUN	1,045,976.13
11	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik				KECAMATAN KOTA BANGUN	2,217,869.80
12	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Baik				JALAN A. YANI, MULAWARMAN II, SRI BANGUN	194,179.30
13	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA LIANG ULU	22,130.00
14	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA MUHURAN	46,040.00
15	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA SEBELIMBINGAN	70,830.00
16	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN ULU	146,325.00
17	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN ULU	54,940.00
18	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA PELA	106,420.00
19	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN SEBERANG	48,040.00
20	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN SEBERANG	43,920.00
21	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KEDANG MURUNG	88,540.00
22	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KEDANG MURUNG	243,735.00
23	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA PELA	48,700.00
24	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Tidak		DESA SEBELIMBINGAN	70,830.00
25	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Tidak		DESA PELA	35,410.00
26	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Tidak		DESA KEDANG MURUNG	66,410.00
27	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		RT. 10 DESA KOTA BANGUN ILIR	26,725.00
28	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN ILIR	198,608.00
29	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA SEBELIMBINGAN	95,390.00
30	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Beton	100	DESA PELA	191,390.00
31	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik	Tidak			DESA SEDULANG	96,800.00
32	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		DESA MUHURAN	95,580.00
33	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA LIANG ILIR	230,970.00
34	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA LIANG ULU	236,785.00
35	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA LIANG ULU	66,410.00
36	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA MUHURAN	74,820.00
37	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		MUHURAN	84,120.00
38	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN SEBERANG	303,800.00

Tabel 2.3.3 daftar aset gedung dan bangunan

No	Nama Barang	Kondisi	Kontruksi Bangunan		Luas	Letak Lokasi	Harga
			Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak			
1	2	5	6	7	8	9	10
39	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KEDANG MURUNG	164,065.00
40	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA PELA	106,400.00
41	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak	294	RT. 11 DESA KOTA BANGUN ULU	59,750.00
42	Asrama Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN ULU	53,120.00
43	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	Tidak	Beton		DESA LOLENG KECAMATAN KOTA BANGUN	377,960.00
44	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	Tidak	Beton		DESA LOLENG KECAMATAN KOTA BANGUN	167,100.00
45	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	Tidak	Beton		DESA LOLENG KECAMATAN KOTA BANGUN	129,300.00
46	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN	27,200.00
47	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN SEBERANG KECAMATAN KOTA BANGUN	30,000.00
48	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN	27,200.00
49	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		DESA PELA KECAMATAN KOTA BANGUN	49,500.00
50	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA LIANG ILIR KECAMATAN KOTA BANGUN	89,500.00
51	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN	180,600.00
52	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN	115,300.00
53	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	Tidak	Tidak		kota bangun	132,552.00
54	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	Tidak	Beton	11.25	Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun	79,370.00
55	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	Tidak	Beton	770	Jl. Sri Bangun RT. 19 Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun	119,090.00
56	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak	60	DESA KOTA BANGUN ULU	524,892.56
57	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak	80	DESA LIANG ILIR	163,361.00
58	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Beton		Jalan Sri Bangun RT. 20, Desa Kota Bangun Ulu	41,243.00
59	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Kota Bangun	2,433,152.50
60	Bangunan Posyandu	Baik	Tidak	Tidak	48	DESA SEBELIMBINGA N. KEC. KOTA BANGUN	58,583.00
61	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	Baik				JL. SRI BANGUN. KEC. KOTA BANGUN	67,750.00

Tabel 2.3.3 daftar aset gedung dan bangunan

No	Nama Barang	Kondisi	Kontruksi Bangunan		Luas	Letak Lokasi	Harga
			Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak			
1	2	5	6	7	8	9	10
62	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Baik	Tidak		330	KEC. KOTA BANGUN	422,400.00
63	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	Tidak	Beton	20	KEC. KOTA BANGUN	120,611.80
64	Bangunan Parkir lainnya (dst)	Baik	Tidak	Beton	504	Jalan Ki Hajar Dewantara RT. 18 Desa Kota Bangun Ulu	198,155.50
65	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Baik	Tidak	Beton		Jl. Kihajar Dewantara RT. 19 Desa Kota Bangun Ulu, Kec. Kota Bangun Kab. Kukar	129,709.45
66	Bangunan Posyandu	Baik	Tidak	Tidak	16	DESA KOTA BANGUN ILIR	8,850.00
67	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN ILIR	8,850.00
68	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN ILIR	8,850.00
69	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak	32	DESA KOTA BANGUN ULU	14,160.00
70	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak	20	DESA KOTA BANGUN ULU	12,390.00
71	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		RT. 17 DESA KOTA BANGUN ULU	13,220.00
72	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN	9,000.00
73	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		RT. V DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN	18,100.00
74	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN	13,600.00
75	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN	9,000.00
76	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		RT. 03 DESA LOLENG KECAMATAN KOTA BANGUN	11,900.00
77	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN SEBERANG KECAMATAN KOTA BANGUN	9,000.00
78	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN ULU KECAMATAN KOTA BANGUN	6,300.00
79	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN ULU KECAMATAN KOTA BANGUN	6,300.00
80	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN ULU KECAMATAN KOTA BANGUN	8,073.00
81	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA PELAK KECAMATAN KOTA BANGUN	9,000.00
82	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN	9,000.00

Tabel 2.3.3 daftar aset gedung dan bangunan

No	Nama Barang	Kondisi	Kontruksi Bangunan		Luas	Letak Lokasi	Harga
			Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak			
1	2	5	6	7	8	9	10
83	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN SEBERANG KECAMATAN KOTA BANGUN	9,000.00
84	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		DESA PELA KECAMATAN KOTA BANGUN	9,000.00
85	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Baik	Tidak	Tidak		DESA LOLENG KECAMATAN KOTA BANGUN	13,600.00
86	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN ILIR KECAMATAN KOTA BANGUN	18,000.00
87	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		DUSUN MARGO REJO DESA LOLENG KECAMATAN KOTA BANGUN	4,500.00
88	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		DESA LOLENG KAMPUNG KECAMATAN KOTA BANGUN	18,100.00
89	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	Tidak	Tidak		DESA KOTA BANGUN SEBERANG KECAMATAN KOTA BANGUN	9,000.00
90	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Baik			12	DESA KOTA BANGUN ILIR. KEC. KOTA BANGUN	17,520.00
91	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	Baik				JL. SRI BANGUN	8,640.00
92	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	Baik				KEC. KOTA BANGUN	4,320.00
93	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	Baik			48	KEC. KOTA BANGUN	4,320.00
94	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	Baik			48	KEC. KOTA BANGUN	4,320.00
95	Rumah Negara Golongan III Tipe B Semi Permanen	Baik				KEC. KOTA BANGUN	4,320.00
							15,311,387.64

Sumber: Bagian Umum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Kecamatan Kota Bangun, Agustus 2025

2.3.4. Aset Jalan Dan Jembatan

Aset Jalan Dan Jembatan adalah aset yang mencakup Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.. Aset Jalan Dan Jembatan kecamatan Kota Bangun dapat kami sajikan dalam table di bawah ini

Tabel 2.3.4 Daftar aset Jalan dan Jembatan

No	Nama Barang	Kontruksi	Panjang	Lebar	Luas	Letak/ Lokasi Alamat	Kondisi	Keterangan
			KM	M	M2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jembatan Pada Jalan Desa					KECAMATAN KOTA	1,231,136.96	Baik

No	Nama Barang	Kontruksi	Panjang	Lebar	Luas	Letak/ Lokasi Alamat	Kondisi	Keterangan
			KM	M	M2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						BANGUN		
2	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain					DESA MUHURAN KEC. KOTA BANGUN	23,596.70	Baik
3	Jembatan Pada Jalan Desa					Desa Kota Bangun Ilir, Ulu dan Muhuran KECAMATAN KOTA BANGUN	3,152,078.61	Baik
4	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)					KECAMATAN KOTA BANGUN	554,022.01	Baik
5	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain					Desa KBU, KBI, Liang. KECAMATAN KOTA BANGUN	213,789.76	Baik
6	Jalan Desa	SEMEN				DESA KOTA BANGUN ULU	19,920.00	Baik
7	Jalan Desa	TANAH				DESA LOLENG II	207,375.00	Baik
8	Jalan Khusus Lainnya	SEMEN	15	14	210	DESA KOTA BANGUN ULU	32,230.00	Baik
9	Jalan Khusus Lainnya	SEMEN				DESA KOTA BANGUN ULU	39,840.00	Baik
10	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN				RT. 2 DESA KOTA BANGUN ULU	119,170.00	Baik
11	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN				RT. 13 DESA KOTA BANGUN ULU	83,290.00	Baik
12	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN				RT. 15 DESA KOTA BANGUN ULU	119,200.00	Baik
13	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULUN				RT. 15 DESA KOTA BANGUN ULU	105,310.00	Baik
14	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	80	2	160	DESA KOTA BANGUN ULU	73,160.00	Baik
15	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	220	2	440	RT. 10 DESA KOTA BANGUN ILIR	204,860.00	Baik
16	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	146	2	292	RT. 02 DESA KOTA BANGUN ILIR	122,385.00	Baik
17	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	122	2	244	RT. 06 DESA KOTA BANGUN ILIR	115,300.00	Baik
18	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN				DESA KOTA	98,590.00	Baik

No	Nama Barang	Kontruksi	Panjang	Lebar	Luas	Letak/ Lokasi Alamat	Kondisi	Keterangan
			KM	M	M2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						BANGUN SEBERANG		
19	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	78	2	156	DESA LIANG ILIR	61,980.00	Baik
20	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	78	2	156	DESA LIANG ILIR	61,980.00	Baik
21	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	78	2	156	DESA LIANG ILIR	61,980.00	Baik
22	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	78	2	156	DESA LIANG ILIR	61,980.00	Baik
23	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	78	2	156	DESA LIANG ILIR	61,980.00	Baik
24	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	78	2	156	DESA LIANG ILIR	61,980.00	Baik
25	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	30	2	60	RT. 12 DESA LIANG ILIR	26,560.00	Baik
26	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	72	2	144	DESA LIANG ULU	59,320.00	Baik
27	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	72	2	144	DESA LIANG ULU	59,320.00	Baik
28	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	72	2	144	DESA LIANG ULU	59,320.00	Baik
29	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	28	4	112	DESA LIANG ULU	49,580.00	Baik
30	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	74	2	148	DESA SEBELIMBI NGAN	61,980.00	Baik
31	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	74	2	148	DESA SEBELIMBI NGAN	61,980.00	Baik
32	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	74	2	148	DESA SEBELIMBI NGAN	61,980.00	Baik
33	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	74	2	148	DESA SEBELIMBI NGAN	61,980.00	Baik
34	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN				RT. 03 DESA KEDANG MURUNG	66,410.00	Baik
35	Jembatan Desa Lain-lain	KAYU ULIN				DESA LOLENG	115,280.00	Baik
36	Jembatan Khusus Lain-lain	KAYU ULIN	10	7	70	DESA KOTA BANGUN ILIR	28,150.00	Baik
37	Jalan Desa					DESA LOLENG KAMPUNG KECAMATA N KOTA BANGUN	48,100.00	Baik
38	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	94	2	188	RT. 17 DESA LIANG ILIR KECAMATA N KOTA BANGUN	89,500.00	Baik
39	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	82	2	164	RT. 19 DESA LIANG ILIR KECAMATA N KOTA BANGUN	89,500.00	Baik

No	Nama Barang	Kontruksi	Panjang	Lebar	Luas	Letak/ Lokasi Alamat	Kondisi	Keterangan
			KM	M	M2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN				DESA PELA KECAMATA N KOTA BANGUN	89,500.00	Baik
41	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	78	2	156	DESA KOTA BANGUN SEBERANG KECAMATA N KOTA BANGUN	89,500.00	Baik
42	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	95	2	190	DESA LOLENG KECAMATA N KOTA BANGUN	88,500.00	Baik
43	Jembatan Khusus Lain-lain	KAYU ULUN				DESA KEDANG MURUNG KECAMATA N KOTA BANGUN	90,300.00	Baik
44	Jembatan Khusus Lain-lain	KAYU ULIN				DESA LIANG ILIR KECAMATA N KOTA BANGUN	13,500.00	Baik
45	Jembatan Khusus Lain-lain	KAYU ULIN				DESA LIANG ULU KECAMATA N KOTA BANGUN	13,500.00	Baik
46	Jembatan Khusus Lain-lain	KAYU ULIN				DESA PELA KECAMATA N KOTA BANGUN	2,700.00	Baik
47	Jaringan Transmisi Tegangan 1 S/D 3 KVA					DESA KOTA BANGUN SEBERANG KECAMATA N KOTA BANGUN	9,000.00	Baik
48	Jalan Desa	Pengurukan	362	6	2,172	Jl. H.M Aini RT. 14 & 15 Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun	114,440.00	Baik
49	Jalan Desa	TANAH				DESA KOTA BANGUN ILIR	208,500.00	Baik
50	Jembatan Pada Jalan Desa	Kayu Ulin	102	2	204	Desa Liang Ulu RT. 08 Kecamatan Kota Bangun	129,675.00	Baik
51	Jembatan Pada Jalan Desa	Kayu Ulin	112	2	224	Desa Liang Ilir RT. 04 Kecamatan Kota Bangun	129,820.00	Baik
52	Jembatan Pada Jalan Desa	Kayu Ulin	110	2	220	Desa Kedang Murung RT. 04 Kecamatan Kota Bangun	176,350.00	Baik
53	Jaringan Distribusi Lain-lain					Kota Bangun	83,950.00	Baik
54	Jaringan Distribusi Lain-lain					KANTOR CAMAT	15,000.00	Baik

No	Nama Barang	Kontruksi	Panjang	Lebar	Luas	Letak/ Lokasi Alamat	Kondisi	Keterangan
			KM	M	M2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						KOTA BANGUN		
55	Jalan Desa		508	6	1,524	DESA LIANG ILIR	195,060.00	Baik
56	Jalan Desa	TANAH	225	4	900	DUSUN MANTANG RT. XI DESA LOLENG	160,684.00	Baik
57	Jalan Desa	TANAH	224	6	1,341	TANJUNG DURUNG DESA LIANG ILIR	218,047.00	Baik
58	Jalan Desa Lain-lain	BETON	94	4	375	JL. M.SIDIK DESA KOTA BANGUN ULU	113,553.00	Baik
59	Jalan Desa Lain-lain	BETON				JL. SRI BANGUN RT.19 DESA KOTA BANGUN ULU	78,595.00	Baik
60	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	75	2	150	DESA KOTA BANGUN ULU RT. 15 KECAMATAN KOTA BANGUN	133,468.00	Baik
61	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	127	2	254	DESA SEBELIMBINGAN KECAMATAN KOTA BANGUN	177,822.00	Baik
62	Jembatan Pada Jalan Desa		11,353	2	22,706	DESA LIANG ULU	165,661.00	Baik
63	Jembatan Pada Jalan Desa		104	4	416	DESA KEDANG MURUNG	67,958.00	Baik
64	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	100	2	20,072	DESA KOTA BANGUN SEBERANG	172,645.00	Baik
65	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	93	2	186	RT. 15 DESA KOTA BANGUN ULU	167,530.00	Baik
66	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	41	4	165	RT.04 DESA KOTA BANGUN ILIR	244,131.00	Baik
67	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	94	2	189	JL. MULAWAR MAN II RT.09 DESA KOTA BANGUN ULU	162,448.00	Baik
68	Bangunan Pemasukan/Pembuang	BETON	74	160	11,760	JL. SRI BANGUN RT. 19 DESA KOTA BANGUN ULU	178,420.00	Baik
69	Jaringan Distribusi Lain-lain					DESA KOTA BANGUN	82,786.00	Baik

No	Nama Barang	Kontruksi	Panjan	Lebar	Luas	Letak/ Lokasi Alamat	Kondisi	Keterangan
			KM	M	M2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						ULU, KOTA BANGUN ILIR, LIANG & PELAA		
70	Jaringan Distribusi Lain-lain	BESI				Desa Kota Bangun Ilir	79,996.40	Baik
71	Jalan Desa	BATU TANAH	205	3	615	KEC. KOTA BANGUN	141,679.00	Baik
72	Jalan Desa	BETON	104	4	416	KEC. KOTA BANGUN	164,780.00	Baik
73	Jalan Desa	TANAH	103	4	412	KEC. KOTA BANGUN	209,716.00	Baik
74	Jalan Desa	BETON	50	4	200	KEC. KOTA BANGUN	102,620.00	Baik
75	Jalan Desa	BETON	100	2	200	KEC. KOTA BANGUN	134,913.00	Baik
76	Jalan Desa	BETON	48	4	192	KEC. KOTA BANGUN	92,271.00	Baik
77	Jalan Desa	BETON				DESA KOTA BANGUN ULU	83,538.72	Baik
78	Jalan Desa	BATU			1,320	DESA LOLENG	207,514.00	Baik
79	Jalan Desa Lain-lain	BETON				KOTA BANGUN ULU RT. 19	182,016.00	Baik
80	Jalan Khusus Lainnya	TANAH URUG	157	29	4,553	DESA KOTA BANGUN ILIR	207,636.00	Baik
81	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	84	2	168	KEC. KOTA BANGUN	198,587.00	Baik
82	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	43	2	86	KEC. KOTA BANGUN	102,311.00	Baik
83	Jembatan Pada Jalan Desa	kayu ulin	47	4	188	KEC. KOTA BANGUN	207,766.00	Baik
84	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	78	2	156	KEC. KOTA BANGUN	165,644.00	Baik
85	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	78	2	156	DESA SEBELIMBINGAN	166,708.00	Baik
86	Jembatan Pada Jalan Desa	KAYU ULIN	88	2	176	DESA KOTA BANGUN SEBERANG	207,839.00	Baik
87	Jembatan Pada Jalan Desa					KECAMATAN N KOTA BANGUN	204,187.00	Baik
88	Jembatan Khusus Lain-lain	KAYU ULIN	4	8	32	KEC. KOTA BANGUN	56,610.00	Baik
89	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain					Desa KBU, KBI, Liang Ulu, Liang	160,129.80	Baik
							14,475,598.95	

Sumber: Bagian Umum, Tata Laksana, dan Kepegawaian Kecamatan Kota Bangun, Agustus 2025

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu;
- Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;

- Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan/Generasi muda;
- Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan,keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya

Tabel 2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Indikator Tujuan															
Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	75	76	76	76	77	80.37	83.51	88.17	-	-	107.16	109.88	116.01	-	-
Indikator Sasaran															
Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	75	75	76	76	77	71.43	75	76	-	-	95.24	100	100	-	-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75	75	76	76	77	75	75	76	-	-	100	100	100	-	-
Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	69.7	40	40	40	40	36.36	19.52	15.03	-	-	52.17	48.8	37.58	-	-
Indikator Program, Kegiatan & Sub Kegiatan															
Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	88.10	88.10	88.10	88.10	88.10	88.1	88.1	88.1	-	-	100.005	100.005	100.005	-	-
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	50	2	2	2	2	50	2	2	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80	80	80	80	80	80	90	95	-	-	100	112.5	118.75	-	-
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	66.67	60.00	60.00	60.00	60.00	55.00	71.42	60	-	-	82.50	119.0	100	-	-
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Desa	63	33	33	33	33	63	30	30	-	-	100	90.9	90.91	-	-
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150	7	7	7	7	150	7	7	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65	3	3	3	3	50	3	3	-	-	76.92	100	100	-	-
Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55	55	55	55	55	55	55	55	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	3	50	50	50	50	3	50	50	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100	100	100	-	-
Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	70	70	45	-	-	98.01	98.01	63.01	-	-
Jumlah Desa Yang difasilitasi	21	11	11	11	11	21	11	11	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	21	11	11	11	11	21	11	11	-	-	100	100	100	-	-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Pendayagunaan Aset Desa															
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15	11	11	11	11	2	0	0	-	-	13.33	0	0	-	-
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	67	67	67	67	0	0	72.99	-	-	0	0	108.94	-	-
Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	11	11	11	11	11	11	11	-	-	52.381	100	100	-	-
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	3	3	3	3	3	3	-	-	150	100	100	-	-
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	40	40	40	40	45	40	40	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	575	575	575	575	575	575	575	575	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	575	1	1	1	1	575	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	575	1	1	1	1	575	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	575	1	1	1	1	575	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13	12	12	12	12	13	12	12	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan	62	40	40	40	40	28	40	40	-	-	45.16	100	100	-	-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Administrasi Kepegawaian															
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62	1	1	1	1	62	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	5	5	5	3	5	5	-	-	60	100	100	-	-
Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75	1	1	1	1	0	1	1	-	-	0	100	100	-	-
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	3	3	3	3	30	3	3	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	1	1	1	1	5	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	1	1	1	1	24	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	56000	1	1	1	1	50000	1	1	-	-	89.29	100	100	-	-
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	30	30	30	36	40	38	-	-	120	133.3	126.7	-	-
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16	100	100	100	100	16	100	100	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	18	18	18	18	18	1	3	0	-	-	5.56	16.67	0	-	-
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	2	2	2	2	0	2	0	-	-	0	100	0	-	-
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	0	-	-	100	100	0	-	-
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	5	5	5	5	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	5	5	5	5	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	10	10	10	10	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1000	1	1	1	1	1000	1	1	-	-	100	100	100	-	-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Surat Menyurat															
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	168	12	12	12	12	168	12	12	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	684	12	12	12	12	684	12	12	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	566	509	509	509	509	566	509	509	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	3	3	3	1	1	2	-	-	100	100	66.67	-	-
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	6	6	6	6	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25	25	25	25	25	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Indikator Program, Kegiatan & Sub Kegiatan																	
Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	-	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	-	345,380,000	573,378,000	-	-	-	172.7	286.69	-	-	460,055,600	50
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	1,850,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	15,352,247,254	35,681,765,089	11,985,762,166	-	-	830	5097.4	1712.25	-	-	53,431,164,776	85
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1,850,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	15,352,247,254	36,027,145,089	12,559,140,166	-	-	830	4003.0	1395.46	-	-	53,891,220,376	84
Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000		345,380,000	573,378,000	-	-	-	172.7	286.69	-	-	460,055,600	50
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,850,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	15,352,247,254	35,681,765,089	11,985,762,166	-	-	830	5097.4	1712.25	-	-	53,431,164,776	85
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	316,954,636	148,328,881	148,328,881	148,328,881	148,328,881	320,929,800	4,019,215,250	346,829,800	-	-	101	2709.7	233.82	-	-	4,409,511,010	94
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Desa	316,954,636	148,328,881	148,328,881	148,328,881	148,328,881	320,929,800	4,019,215,250	346,829,800	-	-	101	2709.7	233.82	-	-	4,409,511,010	94

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	12,103,800	23,549,500	27,388,500	-	-	80,69	235,50	273,89	-	-	41,131,000	65
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	301,954,636	138,328,881	138,328,881	138,328,881	138,328,881	308,826,000	3,995,665,750	319,441,300	-	-	102,28	2889	230,93	-	-	4,368,380,010	94
Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	116,125,755	116,125,755	116,125,755	116,125,755	-	196,134,000	157,039,600	-	-	-	168,9	135,23	-	-	227,541,920	64
Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	-	116,125,755	116,125,755	116,125,755	116,125,755	-	196,134,000	157,039,600	-	-	-	168,9	135,23	-	-	227,541,920	64
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		113,625,755	113,625,755	113,625,755	113,625,755	-	196,134,000	157,039,600	-	-	-	172,6	138,21	-	-	227,541,920	64
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-		-	-	-	-	0	0,00	-	-	-	0

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Persentase Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	5,000,000	27,500,000	27,500,000	27,500,000	27,500,000	3,540,000	-	-	-	71	0	0	-	-	-	3,540,000	100
Jumlah Desa Yang difasilitasi	5,000,000	27,500,000	27,500,000	27,500,000	27,500,000	3,540,000	-	-	-	71	0	0	-	-	-	3,540,000	100
Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0
Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	3,540,000	0	0	-	71	0	0	-	-	-	3,540,000	100
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7,769,713,328	4,733,863,328	4,733,863,328	4,733,863,328	4,767,521,493	6,874,330,491	8,569,075,133	5,583,729,312	-	-	88	181	118	-	-	16,560,151,486	79
Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,970,705	25,967,377	25,967,377	25,967,377	25,967,377	15,408,000	1,540,000	3,590,000	-	140	6	14	-	-	-	17,666,000	86
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	4,450,000	0	2,820,000	-	0	0	14	-	-	-	5,014,000	69

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,970,705	5,967,377	5,967,377	5,967,377	5,967,377	10,958,000	1,540,000	770,000	-	-	100	26	13	-	-	12,652,000	95	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0	
Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5,368,707,710	3,370,707,710	3,370,707,710	3,370,707,710	3,370,707,710	4,336,390,750	5,228,849,998	3,871,037,467	-	-	81	155	115	-	-	10,339,448,241	77	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5,362,707,710	3,362,707,710	3,362,707,710	3,362,707,710	3,362,707,710	4,332,970,750	5,196,749,998	3,791,717,467	-	-	81	155	113	-	-	10,288,064,241	77	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,420,000	0	0	-	-	57	0	0	-	-	3,420,000	100	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	32,100,000	79,320,000	-	0	642	1586	-	-		47,964,000	43	
Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	47,278,71 ²	27,278,71 ²	27,278,71 ²	27,278,71 ²	27,278,71 ²	14,400,000	19,790,000	120,340,00 ⁰	-	30	73	441	-	-		58,258,000	38	
Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							0	0	-	0	0	0	-	-		-	0	
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7,000,000			0	99,780,000	-	0	0	0	-	-		19,956,000	20	
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							0	0	-	0	0	0	-	-		-	0	
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	47,278,71 ²	27,278,71 ²	27,278,71 ²	20,278,71 ²	27,278,71 ²	14,400,000	19,790,000 ^{.00}	20,560,000	-	30	73	75	-	-		38,302,000	70	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Peersentase Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi	
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	-	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	0	50,000,000	-	0	0	156	-	-	-	10,000,000	20	
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	0	50,000,000	-	0	0	156	-	-	-	10,000,000	20	
Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	475,000,000	240,500,000	240,500,000	240,500,000	240,500,000	291,065,750	525,943,175	553,151,499	-	61	219	230	-	-	-	927,639,225	68	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	2,000,000	2,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50,000,000	25,000,000	25,000,000	23,000,000	23,000,000	52,847,100	186,850,000	-	-	106	0	747	-	-	-	90,217,100	38	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	13,205,000	-	-	0	0	126	-	-	-	2,641,000	20	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	62,956,000	27,915,500	-	53	315	140	-	-	-	108,539,100	83	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	50,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	35,000,000	37,475,500	31,255,000	-	70	150	125	-	-	-	78,726,500	76	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Persentase Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi		
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0		0	-	-	0	0	0	-	-	-	0		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000	124,968,050	355,161,675	249,425,999	-	-	50	284	200	-	-	530,014,925	73		
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	38,250,600	70,350,000	44,500,000	-	-	77	281	178	-	-	117,500,600	77		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	280,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	976,643,429	1,367,379,325	0	-	-	349	1367	0	-	-	2,344,022,754	100		
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	180,000,000	100,000,000	-	-	-	167,031,129	1,171,799,999	0	-	-	93	1172	0	-	-	1,338,831,128	100		
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	180,000,000	-	100,000,000	-	-	0		0	-	-	0	0	0	-	-	-	0		
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100,000,000	200,000,000	-	-	-	809,612,300	195,579,326	0	-	-	810	98	0	-	-	1,005,191,626	100		
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	1,310,251,364	759,251,364	759,251,364	759,251,364	759,251,364	1,099,181,447	1,142,913,353	897,814,846	-	-	84	151	118	-	-	2,421,657,769	77	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	100	150	150	-	-	6,600,000	73	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	702,560,000	402,560,000	402,560,000	402,560,000	402,560,000	617,906,241	602,060,032	510,916,111	-	-	88	150	127	-	-	1,322,149,495	76	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	604,691,364	354,691,364	354,691,364	354,691,364	354,691,364	478,275,206	537,853,321	383,898,735	-	-	79	152	108	-	-	1,092,908,274	78	
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	277,504,837	178,158,165	178,158,165	178,158,165	211,816,330	141,241,115	282,659,282	87,795,500	-	-	51	159	49	-	-	441,459,497	86	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3,850,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,060,800	0	0	-	-	105	0	0	-	-	4,060,800	100	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	273,654,837	173,658,165	173,658,165	103,658,165	103,658,165	137,180,315	282,659,282	87,795,500	-	-	50	163	51	-	-	437,398,697	86	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	2,500,000	2,500,000	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	70,000,000	103,658,165	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	2,500,000	2,500,000	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	

2.5. Kelompok sasaran layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Kota Bangun yaitu:

- Penduduk kecamatan: Semua individu yang terdaftar sebagai penduduk di wilayah kecamatan.
- Perangkat daerah: Aparatur pemerintah kecamatan dan / Desa
- Organisasi kemasyarakatan: Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, PKK, dan lain-lain.
- Dunia usaha: Pelaku bisnis dan industri kecil di kecamatan.
- Kelompok rentan: Termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
- Pihak lain yang membutuhkan pelayanan: Institusi pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain.

2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Kota Bangun dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Kota Bangun maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan antara lain:

- Polsek Kota Bangun, untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- Koramil Kota Bangun, untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- Kantor Urusan Agama, untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- Puskesmas Kota Bangun, untuk melakukan pelaksanaan koordinasi fasilitasi penurunan stunting, posyandu dikecamatan dan pelayanan dasar Kesehatan untuk masyarakat
- Satpol PP, dalam hal Penegakan Perda dan ketertiban umum di wilayah Kota Bangun, dan Patroli gabungan pengawasan penyakit masyarakat, razia minuman keras, serta penanganan gelandangan/pengemis

- Kesbangpol, untuk memberikan fasilitasi perizinan penelitian, rekomendasi kegiatan masyarakat, serta menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- Damkar, untuk menyediakan layanan pencegahan, pemadaman kebakaran, serta penanganan keadaan darurat lainnya di wilayah Kecamatan.
- BPBD, untuk memberikan layanan penanggulangan bencana alam maupun non-alam, termasuk kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana di wilayah Kecamatan.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan, untuk memberikan layanan pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi bantuan bagi petani/keompok tani serta mendukung pengembangan usaha pertanian dan perkebunan masyarakat Kecamatan.
- DP3A, untuk memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kecamatan.
- Perkim, untuk memberikan layanan pendataan dan fasilitasi bantuan rumah layak huni serta penataan kawasan permukiman masyarakat Kecamatan.
- DLHK, untuk memberikan layanan kebersihan, pengelolaan sampah, penataan ruang terbuka hijau, serta pelestarian lingkungan di wilayah Kecamatan.
- Bappeda, untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Kota bangun berjalan dengan baik dan terarah.
- DPMD, untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa, termasuk pengelolaan POSYANTEK Antar Desa di wilayah Kecamatan.
- Disdukcapil, mitra kerja dalam hal layanan penerbitan KTP dan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan, meliputi berbagai

kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Kota bangun.

- Inspektorat, untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
- Bapenda, mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2
- Dinas Sosial, mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.7. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota memiliki tugas dalam koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diidentifikasi dan dijadikan dasar perumusan tujuan, sasaran, serta strategi ke depan

2.7.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Kota bangun saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat

meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kota Bangun maka dapat dirumuskan permasalahan di wilayah ini. Permasalahan kecamatan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal yaitu pokok masalah, masalah, dan akar masalah:

Tabel 2.7.1 Pemetaan Permasalahan Kecamatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya Pelayanan Kecamatan Kota Bangun	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Lemahnya integritas dan profesionalisme aparatur
			Sarana dan Prasarana Ruang dan gedung kantor tempat Pelayanan Publik belum memadai
			Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus dalam memberikan pelayanan
			Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan
			Tidak optimalnya penerapan SOP Pelayanan
			Adanya hambatan proses pencetakan e-KTP karena mesin rusak
		Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan dan kabupaten (perangkat daerah teknis)
			Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.
			Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
			Belum tersedianya database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan dan sapras Umum di kecamatan
			Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Belum optimalnya koordinasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Keterbatasan infrastruktur teknologi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang rendah sehingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Belum optimalnya pembinaan koperasi dan UMKM bersama dengan dinas teknis Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan desa yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas daerah dan nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, stunting, dll
		Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Belum optimalnya peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola pendapatan asli desa Masih terbatasnya pembinaan terhadap aparatur desa Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
		Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di kecamatan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan internal pemda. Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Kurangnya pelatihan bagi perangkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern, termasuk pengelolaan keuangan.
			Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan kecamatan
			Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar PD
			Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Sumber: hasil analisis, 2025

2.7.1 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) adalah memperhatikan isu – isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang.

Pemerintah Kecamatan Kota Bangun dihadapkan pada

tuntutan untuk lebih responsif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika perubahan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pendekatan perencanaan pembangunan harus senantiasa mempertimbangkan isu-isu dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat pada masa yang akan datang, guna memastikan bahwa arah pelaksanaan pembangunan sungguh-sungguh mengarah pada target yang tepat. Karena itu, perlunya perencanaan yang cermat dan komprehensif, sehingga orientasi pembangunan dapat selaras dengan tujuan pengembangan wilayah.

Adapun Permasalahan permasalahan pelayanan yang bersifat makro bagi Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Kota Bangun

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUTAI KARTANEGARA	
1	2	3	4	5	6	7	7
Kewenangan Kecamatan dalam urusan administrasi umum dan pelayanan dasar	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP	Data curah hujan tahunan dari BMKG didominasi oleh curah hujan < 2.200 mm/tahun termasuk Kota Bangun	Transformasi digital pelayanan publik	Implementasi SPBE, OSS, penyederhanaan birokrasi	Integrasi layanan kecamatan di Kaltim	Optimalisasi PATEN & digitalisasi layanan desa-kecamatan	Penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital dan SDM aparatur
Potensi Pertanian dan Perkebunan	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya kewenangan yang sudah dilimpahkan ke	Pencadangan Kawasan Perairan Habitat Pesut Mahakam di Kecamatan Kota	Ketahanan pangan & adaptasi perubahan iklim	Food estate & kedaulatan pangan	Pengembangan pertanian terpadu Kaltim	Optimalisasi pertanian lahan rawa & pesisir	Peningkatan efektivitas program pertanian sesuai kewenangan kecamatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUTAI KARTANEGARA	
	kecamatan	Bangun					
Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial kelompok rentan	Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, banjir	Perubahan iklim berdampak ke ekonomi lokal	Penguatan UMKM & perlindungan sosial	Pengembangan sentra IKM Kaltim	Penguatan koperasi & UMKM lokal	Peningkatan kapasitas IKM & penguatan perlindungan sosial
Potensi Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya pengelolaan PAD Desa	Kurangnya daya dukung & daya tampung penyediaan air bersih	SDGs pembangunan manusia berkelanjutan	Peningkatan kualitas SDM & literasi digital	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja Kaltim	Pemberdayaan masyarakat desa & peningkatan PAD	Optimalisasi SDM desa & peningkatan kapasitas aparatur desa
Pengembangan pariwisata berbasis alam, ekowisata, dan wisata budaya	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	-	Tren ekowisata berkelanjutan	Penguatan destinasi pariwisata prioritas	Kawasan pariwisata Kaltim	Wisata budaya & alam lokal	Pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal
Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan	-	-	Ancaman krisis pangan dunia	Diversifikasi pangan	Pangan lokal Kaltim	Pengembangan lumbung pangan desa	Penguatan ketahanan pangan berbasis desa
Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung	-	-	Transisi energi hijau	Program EBT (Energi Baru Terbarukan)	Potensi energi surya Kaltim	Pemanfaatan energi terbarukan	Pengembangan energi bersih untuk mendukung layanan publik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUTAI KARTANEGARA	
Kawasan Peruntukan Industri	-	-	Kompetisi industri global	Hilirisasi industri & nilai tambah SDA	Kawasan industri Kaltim	Kawasan industri berbasis SDA lokal	Optimalisasi pengembangan kawasan industri berkelanjutan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

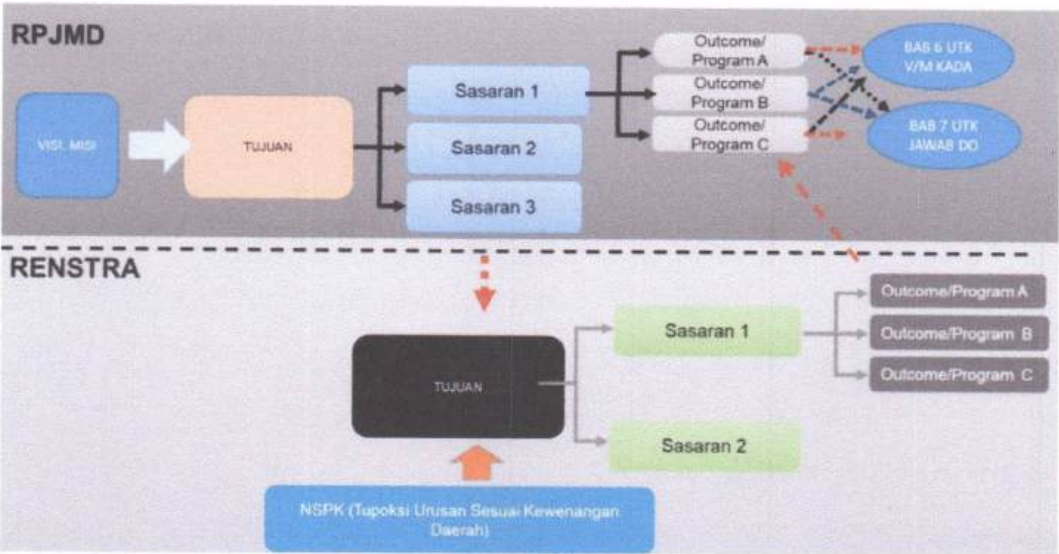
Kecamatan Kota Bangun menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu **"Meningkatnya kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan"**. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu: **"Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara"**. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kota Bangun, dalam hal ini

Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat tercapai.

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kota Bangun menetapkan sasaran strategi “*Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan*”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kota Bangun tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kota Bangun 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen

perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Kota Bangun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. T-C 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	3	4	6	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	N/A	2,75 (C)	3,10 (B-)	3,40 (B-)	3,55 (B)	3,75 (B)	3,90 (B)
	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	100,00	100	100	100	100	100	100
		Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	96.00	97.3	98.6	98.6	100	100	100

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun dalam rangka

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Basis e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif												Ket
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	2	45,252,550	2	175,000,000	2	375,000,000	2	375,000,000	2	375,000,000	2	375,000,000			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2		2	50,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM bidang Triband		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	2	45,252,550	4	125,000,000	4	125,000,000	4	125,000,000	4	125,000,000	4	125,000,000			
PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	68 Persen	68	175,398,000	68	195,000,000	69	270,000,000	69	270,000,000	70	270,000,000	70	270,000,000			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pencapaian Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	2	175,398,000	2	195,000,000	2	270,000,000	2	270,000,000	2	270,000,000	2	270,000,000			

Target dan Pagu Indikatif																
BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Basis e Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket	
			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
1	Pembinaan kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemasyarakatan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemasyarakatan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50	175,398,000	50	180,000,000	50	255,000,000	50	255,000,000	50	255,000,000			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokum en	2	-	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	80 Persen	80	5,000,000	81	80,000,000	81	80,000,000	82	80,000,000	82	80,000,000	83	80,000,000		
Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi yang di bina dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di bina dan diawasi	11 Desa	11	5,000,000	11	80,000,000	11	80,000,000	11	80,000,000	11	80,000,000	11	80,000,000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)			Basis e Tahun 2024			Target dan Pagu Indikatif										Ket																				
									2025					2026						2027					2028					2029					2030				
									Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																								
Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokum en	11	5,000,000	11	5,000,000	11	5,000,000	11	5,000,000	11	5,000,000	11	5,000,000																									
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Lapora n	42		2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69 Poin	69	6,927,881,197	69	6,402,333,553.00	69, 50	6,955,917,317.00	69, 50	6,855,917,317.0 0	70	6,855,917,317.00	70	6,855,917,317.0 0																									
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104 Dokum en	10 4	237,115,150	10 3	325,000,000	10 3	235,000,000	10 3	235,000,000	10 3	235,000,000	10 3	235,000,000																									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokum en	3	56,100,000	3	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000																									
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	43 Dokum en	30	2,500,000	30	-	30	5,000,000	30	5,000,000	30	5,000,000	30	5,000,000																									

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Saasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Basislin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5 Dokum en	5	2,500,000	5	-	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lapora n	4	24,316,950	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lapora n	1	20,370,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lengkap Perangkat Daerah	100 Data	10 0	125,328,200	10 0	250,000,000	10 0	150,000,000	10 0	150,000,000	10 0	150,000,000	10 0	150,000,000	Sub Kegiatan yang mendukung Satu Data Indonesia

Target dan Pagu Indikatif															
BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Basis e Tabun 2024													Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 6,000,000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administral Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Lapora n	15	4,551,790,548	15	4,526,041,725	15	4,526,041,725	15	4,526,041,725	15	4,526,041,725	15	4,526,041,725	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ bulan	53	4,454,681,908	53	4,436,041,725	53	4,436,041,725	53	4,436,041,725	53	4,436,041,725	53	4,436,041,725	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tabun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tabun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tabun SKPD	1 Lapora n	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Lapora n	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	

Target dan Pagu Indikator																
BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Basis e Tahun 2024													Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD															
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokum en	1	7,108,640	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasika n	575 Unit	57 5	129,642,862	57 5	102,278,712	57 5	150,000,000	57 5	150,000,000	57 5	150,000,000	57 5	150,000,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokum en	1	11,900,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokum en	1	48,739,150	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Lapora n	1	21,725,000	1	0	1	0	1	0	1	-	1	-		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerjanya, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Basis e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lapora n	12 47,278,712	12 47,278,712	12 45,000,000	12 45,000,000	12 45,000,000	12 45,000,000	12 45,000,000	12 45,000,000	12 45,000,000	12 45,000,000		
Administral Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administral Kepegawalan	24 Orang	24	-	24	-	25 50,000,000	25 50,000,000	25 50,000,000	25 50,000,000	25 50,000,000	25 50,000,000	25 50,000,000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5	-	5	-	5 50,000,000	4 50,000,000	4 50,000,000	4 50,000,000	4 50,000,000	4 50,000,000	4 50,000,000		
Administral Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administral Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	8 Layana n	8	218,666,360	8	197,474,160	8 353,000,000	8 353,000,000	8 353,000,000	8 353,000,000	8 353,000,000	8 353,000,000	8 353,000,000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	-	1	3,000,000	1 3,000,000	1 3,000,000	1 3,000,000	1 3,000,000	1 3,000,000	1 3,000,000	1 3,000,000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2	67,966,000	2	700,000	2 50,000,000	2 50,000,000	2 50,000,000	2 50,000,000	2 50,000,000	2 50,000,000	2 50,000,000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2	10,500,000	2	-	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -	2 -		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Basis e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif												Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	20,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2	13,774,160	2	13,774,160	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	5,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30	90,926,200	12	75,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000	30	175,000,000	30	175,000,000		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100	10,500,000	100	20,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	18 Unit	18	507,000,000	18	-	18	100,000,000	18	-	18	-	18	-	18	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1	507,000,000	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	-	3	-	3	100,000,000	3	-	3	-	3	-	3	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Basis e Tahun 2024	Target dan Pengu Indikator												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12	932,508,112	12	1,027,788,956	12	935,625,592	12	935,625,592	12	935,625,592	12	935,625,592	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lapora n	1	2,000,000	1	2,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	12	654,729,358	12	671,097,592	12	671,097,592	12	671,097,592	12	671,097,592	12	671,097,592	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	12	275,778,754	12	354,691,364	12	261,528,000	12	261,528,000	12	261,528,000	12	261,528,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	566 Unit	56 6	351,158,165	56 6	223,750,000	56 6	606,250,000	56 6	606,250,000	56 6	606,250,000	56 6	606,250,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Kendaraan Dinas Jabatan Pajaknya	3 Unit	3	50,000,000	3	51,250,000	3	51,250,000	3	51,250,000	3	51,250,000	3	51,250,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Basislin e Tabun 2024	Target dan Pagu Indikatif												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4	173,658,165	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	4	7,500,000	1	2,500,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/dire habilitasi	10 Unit	2	120,000,000	2	70,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	
Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direha bilitasi	25 Unit	1	-	2		10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	

30,622,831,747

20,767,311,553

37,522,817,635

38,983,380,028

42,162,134,785

44,684,569,767

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program RT Ku- Terbaik	Penyaluran Program RT di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
2	Program Pelayanan Publik Cerdas	Mini Mall Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan

4.3 Indikator Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kota Bangun sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kota Bangun

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	N/A	2.75 (C)	3.10 (B-)	3.40 (B-)	3.55 (B)	3.75 (B)	3.90 (B)	Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No.4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pedum terkait pehitungan di Permen PAN RB No. 5 Tahun 2023

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana strategis Perubahan ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2025. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025-2029. Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Rencana strategis Perubahan ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kota Bangun.

Rencana strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Kota Bangun. Dengan demikian,

setelah Rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Kota Bangun telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Kota Bangun, Desember 2025
Camat Kota Bangun

Abdul Karim, S.Pd
NIP. 196911201996031002

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada table Tabel 3.3.1

Tabel 3.3.1 Tabel Strategi Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi di kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan strategi pembangunan di kecamatan, perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kota bangun. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
2026	2027	2028	2029	2030
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan pemanfaatan transformasi pembangunan di Wilayah Kecamatan	Perwujudan fondasi transformasi di Wilayah Kecamatan dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan
Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah serta penguatan kelembagaan pelaku usaha berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing lokal.	Penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi dan pemanfaatan potensi lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Perwujudan transformasi produk unggulan berbasis ekonomi hijau sebagai upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan daerah	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan
Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Pengembangan aksesibilitas wilayah dan fasilitas publik berwawasan lingkungan untuk mendukung pemerataan pembangunan.	Pengembangan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Perwujudan sistem infrastruktur aksesibilitas dan mobilitas yang modern, dan terhubung	Penerapan Integrasi jaringan infrastruktur antarwilayah yang menunjang konektivitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah
Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan
Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat	Penerapan Integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana ke dalam seluruh sektor pembangunan	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Penguatan energi terbarukan dan akselerasi pengurangan emisi karbon untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Kecamatan Kota Bangun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, setelah terjadinya pemekaran kecamatan wilayah kerja meliputi 11 Desa yang menjadi wewenang Kecamatan Kota Bangun. Dengan kondisi gambaran Umum dan Georafis yang berbeda disetiap Desa serta kebutuhan masyarakat yang berbeda pula maka wilayah Kecamatan Kota Bangun memiliki potensi potensi yang sangat beragam.

Kecamatan Kota Bangun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan faktor eksternal serta faktor

internal di dalam kelancaran proses pencapaian tujuan yang akan menjadi isu-isu penting dalam menjalankan Visi dan Misinya sebagai pengemban wewenang Bupati Kutai kartanegara yang dilaksanakan oleh Camat Kota Bangun selain itu juga tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Kota Bangun masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan ke depan ,terkait dengan beberapa permasalahan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Kota Bangun sebagai berikut :

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kota Bangun

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pelayanan Yang Prima	Digitalisasi layanan publik	Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Perizinan	Penguatan sistem pengaduan	Meningkatkan Koodinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3	Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Desa	Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Menyesuaikan Dengan Pelimpahan Urusan Dari Bupati

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
5	Peningkatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Desa
			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan Perubahan Rencana strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025 – 2029 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1 Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Kota Bangun ditentukanlah program, dan kegiatan. Visi dan Misi merupakan komponen strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah juga menjadi dasar dalam menyusun dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Visi dan misi adalah fondasi utama bagi perangkat daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan. Keduanya memastikan perangkat daerah berjalan dengan arah yang jelas, selaras dengan tujuan pembangunan daerah, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. sangat relevan dengan kinerja perangkat daerah Kecamatan Kota Bangun karena mencakup Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengembangan Potensi Lokal

Untuk mencapai visi misi ini, diperlukan kinerja pelayanan yang maksimal. Namun, berbagai faktor pendorong dan penghambat dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan yaitu dukungan Infrastruktur dan Teknologi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Partisipasi Masyarakat, Ketersediaan Anggaran yang Memadai, dan Komitmen Pemerintah Daerah dan faktor yang menghambat seperti Keterbatasan Infrastruktur, Sebagian aparatur belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelayanan berbasis

teknologi, Rendahnya pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi terpadu, Tumpang tindih kewenangan antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya sering kali memperlambat pelaksanaan program

Program yang relevan dengan Kecamatan Kota Bangun sebagaimana tercantum dalam rancangan RPJMD Kukar 2025-2029 berkenaan dengan Pengembangan Destinasi Wisata Potensial, Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan perbaikan jalan desa, jembatan, serta infrastruktur transportasi lainnya, Mendorong program pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan . Meningkatkan kapasitas dan efisiensi pelayanan publik di kecamatan melalui implementasi teknologi digital dan e-government, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Untuk mencapai visi misi ini Kecamatan Kota Bangun menentukan program, dan kegiatan sebagai berikut :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
- b. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan umum serta memberikan pelayanan administrasi dan kebutuhan dasar kepada masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan local yang dilaksanakan oleh pemerintah

kecamatan maupun stakeholder melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal.

- d. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** di tingkat kecamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam rangka menjamin kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif melalui upaya koordinatif lintas sektor serta pelibatan aktif aparat dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman.
- e. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** di Kecamatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh camat sebagai perpanjangan tangan bupati/wali kota dalam mengoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, mencakup pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta penanganan konflik sosial dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- f. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** adalah kegiatan yang dilakukan oleh camat selaku perangkat daerah kabupaten/kota untuk membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4.2. Kegiatan

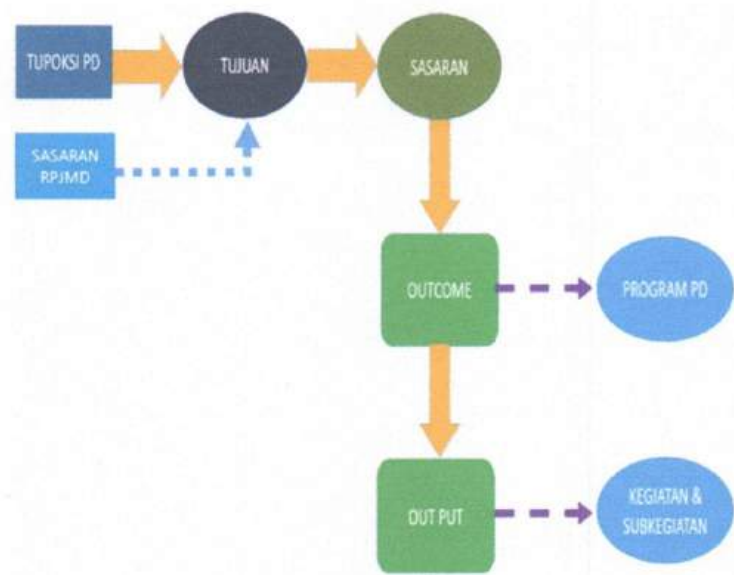
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kota Bangun adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
12. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
13. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
15. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
17. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
18. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kota Bangun merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kota Bangun serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kota Bangun dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Tabel 4.2.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No.4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Meningkatkan Kinerja Pembangunan di Kecamatan				Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan			Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP		
					Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik		
			Tercapainya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program
				Tokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pedum terkait pehitungan di Permen PAN RB No. 5 Tahun 2023;					Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Terselesaikan nya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan
				<i>Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
					Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan
				<i>Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan
				<i>Terselesaikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Tamu		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan
			<i>Tersedia nya barang milik daerah untuk mendukung operasional pemerintahan</i>	<i>Tersedianya barang milik daerah untuk mendukung operasional pemerintahan</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
			<i>Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah</i>	<i>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			ahan	an			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan
				<i>Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan perangkat daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program
			Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan		Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan		
				Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Vertikal Terkait	Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan
				<i>Terlaksannya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	Kegiatan
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
				<i>Terlaksananya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat</i>	<i>Jumla kegiatan pelimpahan kewenangan Camat yang dilaksanakan</i>	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Kegiatan</i>
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kemandirian,		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Program

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan		Desa/Kelurahan Yang Aktif	KELURAHAN	
				<i>Terselenggaranya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Laporan kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Kegiatan</i>
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
				<i>Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Kegiatan</i>
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
			Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan</i>	<i>Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Kegiatan</i>
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program
				<i>Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa		Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program
				<i>Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang dibina dan diawasi</i>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Kegiatan</i>
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Sub Kegiatan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Target dan Pagu Indikatif															
BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Basislin e Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	10 0	1,324,718,000	10 0	1,470,978,000	10 0	1,455,978,000	10 0	1,455,978,000	10 0	1,455,978,000	10 0	1,455,978,000	
	Indeks pelimpahan keuntungan pada kecamatan	N/A	N/ A	21,607,048,300	8,0	12,008,000,000	8.2 0	10,110,922,318	8.4 0	11,671,484,711	8.6 0	14,850,239,468	9.0 0	17,372,674,450	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	2 kegiatan	2	309,641,500	2	350,000,000	2	460,000,000	2	460,000,000	2	460,000,000	2	460,000,000	

Target dan Pagu Indikatif															
BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Bersel e Tahun 2024													Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
1	Koordinasi/ Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Lapora n	2 75,302,500	3 150,000,000	3 210,000,000	3 210,000,000	3 210,000,000	3 210,000,000	3 210,000,000	3 210,000,000	3 210,000,000	3 210,000,000	terdapat Paket kegiatan yang mendukung Program Stunting	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokum en	1 234,339,000	1 200,000,000	1 250,000,000	1 250,000,000	1 250,000,000	1 250,000,000	1 250,000,000	1 250,000,000	1 250,000,000			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1 42,505,000	1 75,000,000	1 150,000,000	1 150,000,000	1 150,000,000	1 150,000,000	1 150,000,000	1 150,000,000	1 150,000,000			
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lapora n	12 42,505,000	12 75,000,000	12 150,000,000	12 150,000,000	12 150,000,000	12 150,000,000	12 150,000,000	12 150,000,000	12 150,000,000	Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian IPP		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan pehimpahan keputusan Camat yang dilaksanakan	2 Kegila n	2 22,579,619,800	2 13,053,978,000	2 10,956,900,318	2 12,517,462,711	2 15,696,217,468	2 18,218,652,450						

Target dan Pagu Indikatif																
BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Basis e Tabun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Ket	
			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Lapora n	4	972,571,500	3	1,045,978,000	3	845,978,000	3	845,978,000	3	845,978,000	3	845,978,000	terdapat Paket kegiatan yang mendukung pelimpahan kewenangan	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dihimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dihimpahkan	80 Lapora n	80	21,607,048,300	80	12,008,000,000	80	10,110,922,318	80	11,671,484,711	80	14,850,239,468	80	17,372,674,450		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	70 Persent ase	70	537,533,700	70, 50	436,000,000	71	18,275,000,000	71, 50	18,275,000,000	72	18,275,000,000	72, 50	18,275,000,000		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan kegiatan Pemberdayaan Desa	8 Kali	8	132,203,200	8	100,000,000	8	17,950,000,000	8	17,950,000,000	8	17,950,000,000	8	17,950,000,000		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembag a	6	108,059,200	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Basislin e Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif												Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Lapora n	2	24,144,000	2	50,000,000	3	17,900,000,000	3	17,900,000,000	3	17,900,000,000	3	17,900,000,000	terdapat Paket yang Mendukung Program Prioritas Dedikasi	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Kegiatan	2	405,330,500	2	336,000,000	2	325,000,000	2	325,000,000	2	325,000,000	2	325,000,000		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembag a	5	405,330,500	5	336,000,000	5	325,000,000	5	325,000,000	5	325,000,000	5	325,000,000	Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian SPM Bidang Kesehatan/ Pendidikan	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penguasaan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	75 Persen	75	45,252,550	75	175,000,000	75	375,000,000	75	375,000,000	75	375,000,000	75	375,000,000		